



**DARI PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA KE
PENDIDIKAN MORAL PANCASILA:
Perubahan Muatan Materi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Pendidikan di
Indonesia Tahun 1966-1975**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:
Berta Silvia
13030112130043**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Berta Silvia, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 22 Maret 2019
Penulis,

Berta Silvia
13030112130043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

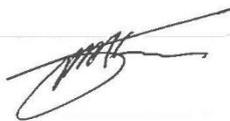
MOTTO

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”

Tan Malaka

Dipersembahkan untuk:
Untuk Ayah, Ibu, Kakak, Sahabat, dan
Ibunda Almh. Yunani, S. Pd.

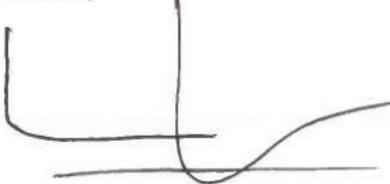
Disetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Mulyono, M. Hum.
NIP 195507091981031004

Skripsi dengan judul “Dari Pendidikan Kewargaan Negara ke Pendidikan Moral Pancasila: Perubahan Muatan Materi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun 1966-1975” yang disusun oleh Berta Silvia (13030112130043) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Jum’at 22 Maret 2019.

Ketua,



Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.

NIP 196808291994031001

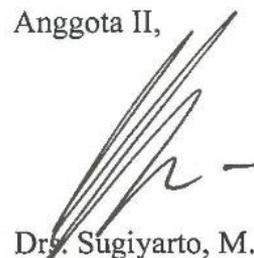
Anggota I,



Dr. Mulyono, M. Hum.

NIP 195507091981031004

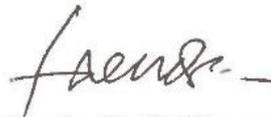
Anggota II,



Dr. Sugiyarto, M. Hum.

NIP 195508071989031002

Anggota III,



Mahendra Pudji Utama, S.S., M. Hum.

NIP 197102241999031001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.

NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dari Pendidikan Kewargaan Negara ke Pendidikan Moral Pancasila: Perubahan Muatan Materi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun 1966-1975” sebagai syarat utama untuk menyelesaikan Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mulyono, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dra. Titiek Suliyati, M.T., selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., Drs. Sugiyarto, M. Hum., Mahendra Pudji Utama, M. Hum., dan Dr. Mulyono, M. Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Imrah Basyarudin dan Naila Wati, ibunda tercinta almh. Yunani, S. Pd., serta Kakak-kakak saya, Yesti Ira Yani, Madra Arbino, S.T., dan Yanis Rahmasari Putri, S.T.P., M. Sc., yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Keluarga Besar Ir. Djohan Purwanto dan Nooridah Aliya atas kebaikan hatinya mendukung serta menyemangati dalam penulisan ini. Selain itu, terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat terdekat saya Parentia Iswara hamid dan Shabrina Noti atas semangat dan dukungannya yang nyata untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat di Departemen Sejarah, Nida Nadiatul Azmi, Ayut Isroh Saptaningtyas, Murni Anggreini, Theresia Andrea Rivanti, Ayu Amalia Maas, Elisabeth Galuh Lita HR., serta teman-teman Departemen Sejarah lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas kebersamaannya selama ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman indekos Novia Winda Sari, Vita Fulla, dan Syavira Zaharani, serta Keluarga Bapak Pungki yang memberikan tempat yang nyaman untuk menyelesaikan penulisan ini. Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman pengurus harian UKM Peduli Sosial Undip Dwi Sektiono, Yulian Hambyah, Adindha Lili Prasmasari, Weni Ariska, Chandra Pradipta, Ninda Ayu Pangestuti, Shabrina Zaki, Perdana Marpaung, dan M. Rifqi Maulana atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis.

Sebagai peneliti pemula, skripsi ini masih jauh dari sempurna dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan.

Semarang, 22 maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN	iv	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI	viii	
DAFTAR SINGKATAN	x	
DAFTAR ISTILAH	xiii	
DAFTAR TABEL	xviii	
DAFTAR LAMPIRAN	xix	
ABSTRAK	xx	
ABSTRACT	xxi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
	B. Ruang Lingkup	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Tinjauan Pustaka	7
	E. Kerangka Pemikiran	12
	F. Metode Penelitian	17
	G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA	21
	TAHUN 1966-1975	
	A. Situasi Politik Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Tahun 1966-1975	21
	1. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I	24
	2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II	26
	B. Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1966-1975	27
	1. Landasan Filsafat Pendidikan Nasional 1966-1975	27
	2. Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru	29
	3. Peserta Didik pada Masa Orde Baru	32
BAB III	PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA	35
	DALAM PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA TRANSISI DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU	
	A. Kurikulum Pendidikan dan Kekuasaan	35
	B. Kurikulum Pendidikan Indonesia Pada Masa Transisi Orde Lama ke Orde baru	37
	1. Kurikulum Pendidikan Pancawardhana	37

	1960-1966	
	2. Kurikulum Pendidikan 1968	42
C.	Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara dalam Kurikulum 1968	43
	1. Pendidikan Kewargaan Negara Tingkat Sekolah dasar	45
	2. Pendidikan Kewargaan Negara Tingkat Sekolah Menengah Pertama	49
	3. Pendidikan Kewargaan Negara Tingkat Sekolah Menengah Atas	54
BAB IV	PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM NASIONAL INDONESIA TAHUN 1975	62
	A. Kurikulum Pendidikan Indonesia Tahun 1975	62
	B. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975	70
	1. Pendidikan Moral Pancasila Tingkat Sekolah Dasar	71
	2. Pendidikan Moral Pancasila Tingkat Sekolah Menengah Pertama	74
	3. Pendidikan Moral Pancasila Tingkat Sekolah Menengah Atas	77
	C. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Nasional Indonesia pada Awal Orde Baru	83
BAB V	SIMPULAN	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	DAFTAR LAMPIRAN	100

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Berdikari	: Berdiri di atas kaki sendiri
BP3K	: Badan Penelitian Pengembanan Pendidikan dan Kebudayaan
DPR GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
EBTANAS	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
G30S/PKI	: Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
GBPP	: Garis-garis Besar Program Pengajaran
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Menwa	: Resimen Mahasiswa
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Orba	: Orde Baru

Orla	: Orde Lama
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PJP	: Pembangunan Jangka Panjang
PKN	: Pendidikan Kewargaan Negara
PMP	: Pendidikan Moral Pancasila
PP dan K	: Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
PPSI	: Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional
PPSP	: Proyek Perintis Sekolah Pembangunan
Puskur	: Pusat Kurikulum
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RI	: Republik Indonesia
Satpel	: Satuan Pelajaran
SD	: Sekolah Dasar
SLA	: Sekolah Lanjutan Atas
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TIK	: Tujuan Instruksional Khusus
TIU	: Tujuan Instruksional Umum
TK	: Taman Kanak-kanak
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UMPTN	: Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri
USDEK	: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
VOC	: Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Perusahaan Dagang Hindia-Timur)
YIIS	: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial

DAFTAR ISTILAH*

<i>civics</i>	: Pelajaran Pemerintahan/ Kewarganegaraan
<i>basic memorandum</i>	: nota atau surat peringatan tidak resmi mengenai hal dasar
<i>basic-idea</i>	: gagasan dasar
<i>capital culture</i>	: modal budaya, mengacu pada asset non-keuangan yang mempromosikan mobilitas sosial di luar kemampuan ekonomi
<i>Catur Karya</i>	: program kerja kabinet Ampera yang berisi empat hal pokok pembangunan nasional, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang-pangan, melaksanakan Pemilu paling lambat 5 Juli 1968, politik luar negeri bebas-aktif, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme
<i>causa prima</i>	: penyebab atau faktor utama tanpa diawali oleh faktor lain

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

<i>characterization</i>	: karakterisasi, perwatakan yang bersifat khas
<i>citizenship transmission</i>	: pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan, pengajaran yang disajikan sebagai pengetahuan untuk membangun perilaku siswa sebagai warga negara yang baik yang juga berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik
<i>cooperative learning</i>	: belajar dan bekerjasama, suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih
<i>de facto</i>	: pada kenyataannya
<i>dehumanisasi</i>	: penghilangan harkat manusia
<i>ambegparamarta</i>	: prioritas
<i>disintegrasi</i>	: Keadaan terpecah belah

dualism	: keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan
<i>Dwi Dharma</i>	: dua tugas Kabinet Ampera, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan stabilitas ekonomi
Dwifungsi	: tugas ganda
<i>Ekaprasetya Pancakarsa</i>	: tekad yang tunggal untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila
eksplisit	: Tegas, tidak bertele-tele
globalisasi	: proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya
<i>good Citizenship</i>	: Warga negara yang baik
hermeneutic	: ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna
<i>hidden curriculum</i>	: Kurikulum tersembunyi
<i>human interaction</i>	: interaksi manusia
<i>indoktrinasi</i>	: pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu (gagasan, sikap, system

	berfikir, prilaku, dan kepercayaan) dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu
internalisasi	: penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
kurikulum	: perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan
militerisme	: paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan (keras, disiplin, dan sebagainya)
<i>National and Character Building</i>	: pembangunan jiwa bangsa
<i>Nawaksara</i>	: judul pidato pertanggung jawaban dari Presiden Soekarno dalam Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966.
<i>neoliberalisme</i>	: aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia I, ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian

nilai	: sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
<i>oil boom</i>	: keuntungan besar yang didapat dari produksi minyak melimpah pada masa Orde Baru
<i>organization</i>	: organisasi, kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama
Pancasila	: dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila
<i>Pancawardhana</i>	: lima kelompok studi pada rencana pendidikan 1964
pawang	: orang yang mempunyai keahlian istimewa dalam menjinakkan sesuatu
pedagogis	: ilmu tentang pendidikan
<i>powerful</i>	: memiliki kekuasaan
<i>receiving</i>	: penerimaan nilai
<i>reflective inquiry</i>	: pertanyaan reflektif
<i>responding</i>	: tanggapan
rezim	: tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa

<i>sanctioning</i>	: tahap persetujuan
<i>Sapta Usaha Tama</i>	: tujuh usaha dasar, yaitu menertibkan aparatur dan usaha- usaha kementerian PP dan K, menggiatkan kesenian, mengharuskan usaha halaman (toga), mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan SLA dan Universitas
sosiologis	: mengenai sosiologi; menurut sosiologi
<i>stupidifikasi</i>	: membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai- nilai kebudayaan yang ada
<i>subject-matter</i>	: materi pelajaran
<i>text-book</i>	: buku pelajaran
<i>unit lesson</i>	: satuan pelajaran
<i>value judgments</i>	: pertimbangan nilai
<i>valuing</i>	: penghargaan nilai

DAFTAR TABEL

3.1	Gambaran Arti <i>Civics</i> pada Kurikulum 1968	44
3.2	Susunan Mata Pelajaran Sekolah Dasar Tahun 1968	47
3.3	Susunan Mata Pelajaran SMP Tahun 1968	49
3.4	Susunan Mata Pelajaran Kelas I SMA Kurikulum 1968	55
3.5	Susunan Mata Pelajaran SMA Kurikulum 1968 Jurusan Ilmu Pasti/ Ilmu Alam	56
3.6	Susunan Mata Pelajaran SMA Kurikulum 1968 Jurusan Sastra Sosial Budaya	57
4.1	Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 1975	72
4.2	Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP Tahun 1975	75
4.3	Susunan Program pengajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum 1975 Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	78
4.4	Susunan Program pengajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum 1975 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	80
4.5	Susunan Program Pengajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum 1975 Jurusan Bahasa	81
4.6	Perubahan Posisi PKN ke PMP di Sekolah	87

DAFTAR LAMPIRAN

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1964 Membaca Usul Dewan Pertimbangan Agung kepada Pemerintah Tertanggal 12 Juli 1964 tentang Pendidikan	100
B. Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional	102
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Budaya	111
D. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 020/1969 tentang Seminar Tentang Identifikasi Problema Pendidikan Khususnya Mengenai Kurikulum Sarana dan Pembiayaan Pendidikan	117
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara	118
F. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 008c/U/1975 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Dasar	127

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang mencakup kondisi politik yang melatarbelakangi, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan tahun 1966 sampai dengan 1975, serta perubahan dalam muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahap. Pertama, heuristik berupa mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber primer dan sekunder, kedua, pengujian sumber, selanjutnya, sintesis dan terakhir, historiografi yaitu bagaimana merekonstruksi hasil interpretasi ke dalam penulisan sejarah.

Pada tahun 1966, di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan yaitu Soekarno yang masih memimpin sebagai Presiden dan Jenderal Soeharto dari pihak militer yang memegang kepemimpinan di Pemerintahan. Hal tersebut terjadi setelah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965. Situasi politik ini juga memengaruhi bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sering kali menjadi mandat politik dan alat ideologi bagi rezim yang berkuasa, sehingga akan berubah seiring pergantian rezim. Pada awal Orde Baru, pemerintah menerapkan Kurikulum 1968 menggantikan kurikulum sebelumnya yang dianggap tidak menyampaikan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nama mata Pelajaran PKN baru dikenal pada kurikulum 1968. Pada tahun 1975, Pemerintah mengganti Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975 sehingga menyebabkan berganti pula mata pelajaran PKN menjadi PMP. Materi pelajaran PKN pada Kurikulum 1968 lebih sebagai pendidikan Tata Negara, sedangkan pada PMP Kurikulum 1975 berubah menjadi indoktrinasi membentuk manusia pembangunan yang Pancasilais dengan masuknya GBHN.

ABSTRACT

This thesis discusses about Changes in Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) into Pendidikan Moral Pancasila (PMP) subjects, which included background political policies, government policies in education from 1966 to 1975, and changes in the material content of Pancasila values in these subjects.

This thesis used historical method with four phase inside. First is heuristik like searching, finding, and collecting primary and secondary source, second is source examination, third is synthesis process and the last is historiography, how to reconstruction output of interpretation in historical writings.

In 1966, there was a dualism of leadership in Indonesia, Soekarno, who still presided as President and General Soeharto of the military who held leadership in the Government. This happened after the G30S / PKI in 1965. This political situation also affects the education sector in Indonesia. Citizenship education in Indonesia is often a political mandate and an ideological tool for the ruling regime, so that it will change with regime change. At the beginning of the Orde Baru, the government applied the 1968 curriculum to replace the previous curriculum which was considered not to convey pure and consistent Pancasila. The name of the PKN subject is known in the 1968 curriculum. In 1975, the Government replaced the 1968 curriculum into the 1975 curriculum, causing the PKN subjects to change to become PMP. The subject matter in the PKN the 1968 curriculum is more than a state education, whereas in the PMP the 1975 curriculum turned into indoctrination forming a Pancasila human development with the entry of GBHN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pendidikan karakter dewasa ini mulai digalakkan kembali. Penanaman kembali nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda dinilai sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang berbudi pekerti luhur. Penanaman nilai-nilai Pancasila bila ditinjau dari sejarahnya bukanlah hal yang baru. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam hal ini melalui mata pelajaran Kewarganegaraan berkembang sejak pemerintahan Orde Lama dimulai dengan Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1961), Kewargaan Negara (1962), dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pemerintahan Orde Baru mengubah mata pelajaran itu menjadi Pendidikan Moral Pancasila (1975), serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994). Pemerintahan setelah reformasi mengubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (2003).¹

Para pendiri bangsa telah menetapkan kebijakan arah pendidikan bangsa sejak penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu: “mencerdaskan kehidupan bangsa ... yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa

¹Sunarso, “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim” (Disertasi pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 60-65.

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen mempertegas kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia yaitu:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Pendidikan nasional diciptakan untuk menjadi kekuatan yang menentukan dalam membangun bangsa berdasar cita-cita berbangsa sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945.³ Berdasar hal tersebut, maka sudah jelas bahwa arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya saja, melainkan juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi (kejiwaan), dan cerdas spiritualnya.⁴

Pada masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam keputusan presiden nomor 145 tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan-Induk Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Kebijakan pendidikan pada waktu itu dikenal dengan *Sapta Usaha Tama* (menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementrian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K), menggiatkan kesenian, mengharuskan usaha halaman

²Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 283.

³Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 188.

⁴Supardi U.S, "Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tatataran Kebijakan dan Implementasi" dalam *Jurnal Formatif*, 2012, vol. 2, no. 2, hlm. 114-115.

(toga), mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan SLA dan Universitas) dan *Pancawardhana* (Lima Dasar Perkembangan: cinta tanah air dan bangsa, moral nasional/internasional, keagamaan; kecerdasan; emosional artistic, atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; keprigelan atau kerajinan tangan; jasmani). Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959 yang dinamakan *Sapta Usaha Tama*.⁵

Pada masa Orde Baru, tepatnya tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama *Ekaprasetya Pancakarsa* atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini dikukuhkan melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.⁶

Usia pendidikan adalah setua umat manusia. Pendidikan adalah suatu interaksi manusia (*human interaction*) antara pendidik/ guru dengan anak didik/ subjek didik/ peserta didik/ siswa yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya yang berorientasikan pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan manusia tersebut.

⁵Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia: Dari Era Klasik Hingga Terkini* (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 397.

⁶Adi Sudirman, *Sejarah lengkap Indonesia*, hlm. 418.

Menurut Driyarkara SJ, dalam buku *Kebijakan-kebijakan Pendidikan* karya Ary H. Gunawan, pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Jadi pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal yang berlangsung seumur hidup. Menurut Ary H. Gunawan, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi.⁷

Pengaruh Pemerintah dalam pendidikan ini cukup besar melalui segala kebijakan yang ditempuh guna kesuksesan pendidikan seluruh warga negara. Hal tersebut dapat dilihat sejak zaman penjajahan, kebijakan-kebijakan pendidikannya tentu disesuaikan demi kepentingan kaum penjajah serta disesuaikan pula dengan tujuan politik yang diterapkan. Pendidikan pada zaman kemerdekaan mulai dibangkitkan kembali melalui pendidikan yang bersifat patriotisme, kesadaran nasional sampai dengan Pendidikan Nasional Pancasila.

Pancasila selain sebagai dasar dan falsafah negara, juga merupakan landasan bagi falsafah pendidikan karena cita-cita pendidikan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara untuk mewujudkannya. Persoalan pokok yang menjadi fokus kajian penelitian di dalam skripsi ini adalah perubahan muatan materi pelajaran yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia tahun 1966 sampai dengan 1975. Fokus kajiannya adalah perubahan muatan materi yang terdapat pada mata pelajaran PKN pada Kurikulum 1968 menjadi PMP pada Kurikulum 1975 di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah.

Penelitian ini akan dipandu melalui pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanaman nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada periode 1966-1975?; *Kedua*, bagaimana muatan materi penanaman nilai-nilai

⁷Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 1.

Pancasila dalam mata pelajaran PKN dan PMP? Apakah memiliki perbedaan? Mengapa itu terjadi?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup spasial adalah suatu batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu. Penelitian ini mengambil lingkup nasional. Pemilihan Indonesia sebagai cakupan lingkup spasial penelitian karena penelitian ini mengkaji tentang penerapan dari kebijakan pendidikan di Indonesia tentang penanaman nilai-nilai dari Pancasila sebagai karakter bangsa. Kebijakan tersebut dituangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pada Kurikulum 1968 dan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975.

Ruang lingkup temporal yaitu tinjauan dari penulisan skripsi yang dibatasi dalam kerangka waktu tertentu.⁸ Adanya jangka waktu memberikan kemungkinan untuk melihat perkembangan supaya diperoleh uraian yang cukup jelas.⁹ Penulis memilih ruang lingkup temporal antara tahun 1966-1975. Pembatasan waktu penelitian dimulai 1966, karena pada waktu tersebut terjadi perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemerintah Orde Baru meninjau kembali Ketetapan Presiden No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila karena dipandang tidak sesuai dengan UUD 1945. UU No. 12/1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah serta UU No. 22/ 1961 tentang Perguruan Tinggi masih diberlakukan dengan diperbaiki melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, terutama pada Tujuan Pendidikan. Penelitian diakhiri pada tahun 1975, karena pada tahun tersebut ada perombakan kurikulum secara besar-besaran ditandai dengan

⁸Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 76.

⁹Sartono Kartodirdjo, *Lembar Sejarah: Metode dan didaktik Sejarah* (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM, 1970), hlm. 39.

penetapan Kurikulum 1975 dengan pemberlakuan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Ruang lingkup keilmuan merupakan batasan aspek-aspek yang dianalisis. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada argumentasi yang jelas dan logis yang didukung oleh data dan fakta.¹⁰ Ruang lingkup keilmuan yang penulis pilih sesuai dengan bidang keilmuan sejarah sosial khususnya yang mengkaji tentang sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai luhur Pancasila. Sejarah pendidikan itu pada umumnya bernilai bagi perkembangan kebudayaan. Mempelajari sejarah pendidikan berarti mempelajari kebudayaan tetapi bagi kaum pendidik, sejarah pendidikan itu mempunyai nilai yang khusus karena dengan mempelajari sejarah pendidikan berarti memperoleh pengertian tentang fungsi pendidikan dalam keseluruhan kebudayaan. Sejarah pendidikan juga mengajarkan bagaimana membedakan yang bernilai tinggi dan mana yang tidak, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang salah dalam melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Sejarah pendidikan memberikan pengalaman agar tidak memandang rendah hal-hal lama dan menganggap tinggi hal-hal baru, dengan demikian akan menyadari bahwa pendidikan itu hendaknya disesuaikan dengan perubahan-perubahan keadaan, ilmu pengetahuan, dan teknik. Mempelajari sejarah pendidikan dapat memberikan contoh-contoh pendidikan yang baik dan memahami bahwa pendidikan dan tugas pendidik sangat penting artinya. Uraian tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin memahami keadaan sekarang dan ingin berusaha mencapai kemajuan hendaknya mengetahui hal-hal dari masa yang telah lampau.¹¹ Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi pembacanya yang ingin mengetahui bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia khususnya pada upaya penerapan nilai Pancasila.

¹⁰Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah* (Semarang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 21.

¹¹I. Djumhur dan Danasuparta, *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu Bandung, 1976), hlm.1-2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dirumuskan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, mendeskripsikan sistem penanaman nilai-nilai Pancasila pada kurikulum tahun 1966-1975, dalam hal ini juga mengungkap bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam pendidikan Indonesia yang menitikberatkan pada Pancasila hingga pemberlakuan mata pelajaran PMP melalui kurikulum 1975. *Kedua*, mendeskripsikan Kurikulum Pendidikan Nasional 1966-1975 yang kemudian memfokuskan pada implementasi penerapan mata pelajaran PKN hingga menjadi PMP dengan tujuan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai karakter bangsa, hal ini juga dapat disandingkan dengan pendidikan karakter yang saat ini mulai banyak diperbincangkan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah yang dilakukan terhadap beberapa pustaka atau sumber yang berguna untuk mendukung proses penulisan skripsi ini. Telaah pustaka memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penelitian karena memiliki beberapa fungsi di antaranya memperdalam masalah yang hendak diteliti, menegaskan kerangka konseptual yang akan dijadikan landasan pemikiran, dan mempertajam konsep yang digunakan supaya memudahkan dalam merumuskan hipotesis. Tinjauan pustaka memuat uraian tentang isi pustaka secara ringkas, penjelasan tentang relevansi (tema, lokasi, permasalahan, atau kerangka pemikiran yang dibangun) antara pustaka yang ditinjau dengan penelitian yang dilakukan sekaligus menunjukkan perbedaannya.¹²

Terdapat beberapa pustaka yang relevan dengan pokok pembahas dalam penelitian ini salah satunya adalah karya dari C.E. Beeby. Beeby adalah seorang konsultan selama 30 tahun lebih untuk pembaharuan dan perencanaan pendidikan di 10 negara dalam kawasan Asia, Afrika, Pasifik Selatan, dan Karibia. Karyanya

¹²Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sejarah*, hlm.21.

tersebut memuat pandangannya terhadap pendidikan di Indonesia masa tahun 1975 selama bertugas sebagai konsultan tamu pada *Ford Foundation* di Indonesia. Buku yang berjudul *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan* (terjemahan BP3K dan YIIS) ini dapat membantu peneliti dalam melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada kurun waktu yang relevan dengan ruang lingkup temporal penelitian. Pandangan Beeby dalam karyanya tersebut dapat menjadi referensi tentang kondisi pendidikan di Indonesia masa itu, namun pandangan Beeby tersebut masih bersifat sangat luas dan lebih banyak membahas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tentang pendidikan dan agak sulit memahami maksudnya karena buku tersebut merupakan terjemahan.¹³

Pustaka berikutnya adalah karya dari Ary H. Gunawan yang berjudul *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Buku ini terdiri dari 340 halaman yang merupakan cetakan pertama pada tahun 1981 dan diterbitkan di Jakarta oleh Bina Aksara. Isi dari buku ini ialah gambaran tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia sejak zaman sebelum kedatangan Belanda, pada saat zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, hingga zaman Republik Indonesia merdeka. Pendidikan adalah hal yang penting untuk menunjang pengembangan manusia yang seutuhnya. Pada zaman sebelum kedatangan Belanda di Indonesia relatif dapat dikatakan tidak atau belum ada kebijakan pendidikan yang berarti, karena pada umumnya pendidikan diarahkan pada kesempurnaan pribadi. Pada masa penjajahan Belanda dibagi menjadi zaman VOC dan Zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman ini sudah diterapkan kebijakan pendidikan dan sudah mempunyai tujuan pendidikan yaitu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar demi kepentingan kaum Belanda. Kesempatan belajar pun dibagi menjadi beberapa golongan sosial yang didasarkan keturunan, bangsa, dan status. Pada zaman pendudukan Balatentara Jepang, perhatian terhadap pendidikan sangatlah sedikit sebab memenangkan perang adalah tujuan utama dari angkatan senjata Jepang. Secara kongkret ditinjau dari sudut lain, tujuan utama

¹³C.E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman perencanaan*, terjemahan BP3K dan YIIS (Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1981).

pendidikan pada masa Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma yang disebut “*romusha*” dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan Jepang. Zaman kemerdekaan Republik Indonesia adalah masa proklamasi sampai masa pemerintahan Orde Baru ketika buku ini diterbitkan. Pembagian kajian masa Indonesia merdeka dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: periode 1945-1950, periode 1950-1959, periode 1959-1966, dan periode 1966-1980an (masa buku ini diterbitkan). Fokus kajian dalam buku Ary H. Gunawan tersebut yang membantu untuk penulisan skripsi ini ialah mengenai kebijakan pendidikan RI periode 1966-1980an. Pada periode Orde Baru tersebut, Ary H. Gunawan menggambarkan bahwa untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka dibuatlah isi pendidikan yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Buku ini menjadi referensi untuk penulisan pada bab II tentang Pendidikan Nasional Indonesia, khususnya pada landasan filsafat pendidikan Nasional 1966-1975.¹⁴

Pustaka lainnya yang sesuai adalah karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto dengan judul *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Buku ini merupakan edisi pemutakhiran cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Balai Pustaka di Jakarta. Buku dengan 808 halaman ini merupakan bagian terakhir buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang mengandung masalah-masalah khusus menyangkut sifat periode yang lazim disebut *contemporary history* atau sejarah sezaman. Periode yang dalam masyarakat secara populer disebut zaman Jepang dan zaman kemerdekaan ini masih sempat dialami oleh sebagian besar orang yang masih hidup. Hal tersebut menyebabkan setiap orang yang pernah mengalami peristiwa sejarah tersebut mempunyai pengalaman pribadi atau setidaknya kesan pribadi mengenai peristiwa-peristiwa dalam periode ini. Buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid VI ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: zaman Jepang, Perang Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Orde

¹⁴Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

Baru. Kajian yang membantu untuk penulisan skripsi ini adalah bab lima mengenai Orde Baru. Pada bab ini memberikan uraian tentang stabilisasi politik, ekonomi, serta Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang membantu penulisan bab dua pada skripsi ini mengenai situasi politik Indonesia dan kebijakan pemerintah tahun 1966-1875.¹⁵

Buku lain yang relevan dengan kajian skripsi ini berjudul *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* karya Tilaar. Buku yang berisi 384 halaman ini diterbitkan tahun 2003 di Magelang oleh penerbit Indonesia Tera. Pada permulaan bab di buku ini dijelaskan secara rinci mengenai pendidikan dalam perspektif studi kultural, mulai dari perkembangan global (*The New Left Movement, Neo marxisme*), nasional (Ki Hajar Dewantara dan Soedjatmoko), dan manifesto tentang studi kultural sekaligus menjelaskan studi kultural dalam pedagogik kritis transformatif.

Bab selanjutnya menjelaskan hubungan kekuasaan dan pendidikan. Buku ini menjelaskan epistemologi kekuasaan, konsep-konsep kekuasaan (baik dari teori hegemoni Gramsci, nihilism Nietzsche, sampai Posmodernisme Foucault). Kekuasaan bukan hanya rezim fasis tetapi telah “menggurita” dalam dunia kebudayaan dan pendidikan. Dunia Pendidikan sering kali digunakan untuk memperkuat atau melanggengkan struktur kekuasaan dan mempertahankan ideologi dan hagemoni negara. Beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan pendidikan berdasarkan kekuasaan adalah: *domestifikasi* dan *stupidifikasi*, *indoktrinasi*, *dehumanisasi*, *disintegrasi*, serta *capital culture*. Tilaar menjelaskan bahwa untuk membangun masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat yang sejahtera dan demokratis, maka pendidikan multikultural menempati posisi sentral dalam pembinaan generasi Indonesia baru. Pendidikan tersebut mencakup tentang identitas bangsa, kebudayaan nasional, hak asasi manusia, maupun pendidikan nasional yang berdasar pada moral Pancasila. Tilaar juga menjelaskan bahwa globalisasi dan neoliberalisme adalah sumber kekuatan baru dalam pendidikan.

¹⁵Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia VI* cet. 2 Edisi Pemutakhiran (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Pada bagian akhir buku ini dilampirkan beberapa artikel tentang manajemen pendidikan, pengembangan pendidikan tinggi, dan konstruksi revolusi pendidikan. Buku ini digunakan sebagai acuan pada bab tiga mengenai kurikulum pendidikan dan kekuasaan dalam skripsi ini.¹⁶

Pustaka yang akan menjadi tinjauan selanjutnya adalah berupa Artikel penelitian. Artikel penelitian tersebut berjudul *Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional* karya Agus Sutono. Artikel penelitian ini telah dimuat di Jurnal Ilmiah *Civis*, Volume V no. 1 yang diterbitkan pada Januari 2015. Pokok bahasan dalam artikel ini menyangkut tentang filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiositas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujud melalui proses pendidikan yang bermartabat. Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskriptif-analitis serta menggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Hal tersebut senada dengan pertanyaan penelitian pada skripsi ini juga yaitu mempertanyakan tentang bagaimana implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKN dan

¹⁶H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang: Indonesia Tera, 2003).

PMP? Dari uraian tersebut maka artikel ini dianggap penting untuk menjadi rujukan pustaka dalam penelitian skripsi ini.¹⁷

Historiografi yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat menunjang penelitian skripsi ini. Topik yang penulis ambil mengenai perubahan muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia pada periode 1966-1975 masih orisinal dan belum dikaji.

E. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini membahas tentang perubahan muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pada tahun 1966 dan kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975.

Sistem pendidikan yang diterapkan sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁸ Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁷Agus Sutono, "Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional" (*Jurnal Ilmiah Civis*, Volume V, No. 1, Januari 2015), hlm. 666-678.

¹⁸Jalaludin dan Abdullah, *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm. 168.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁹

Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Suatu bangsa akan menjadi kuat jika sistem pendidikan telah berkualitas baik. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsanya. Sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa Indonesia, tujuan nasional serta hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa ini dilambangkan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, dan pandangan hidup Pancasila. Memperhatikan dan melihat fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara dan bangsa, khususnya dalam menumbuhkan kembangkan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seharusnya terbina dengan konsisten.²⁰

Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi bukan hanya sebagai dasar negara Republik Indonesia saja, melainkan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum positif dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia.²¹ Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan dasar pemikiran terdalam yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup tersebut berakar pada budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia itu

¹⁹Agus Sutono, "Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional" (Jurnal Ilmiah *Civis*, Volume V, no. 1, Januari 2005), hlm. 668.

²⁰Jalaludin dan Abdullah, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 170.

²¹Agus Sutono, *Meneguhkan Pancasila*, hlm. 669.

sendiri, sehingga bagi bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tersebut harus menjadi alat pemersatu bangsa namun tidak mematikan keanekaragaman.²²

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Pancasila merupakan substansi utuh atau kesatuan organik.²³

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, nilai positif dan nilai logis, estetika, etis, sosial, serta religious.²⁴ Pendidikan nilai adalah pendidikan yang menyosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pendidikan Kewargaan Negara atau dikenal juga dengan istilah *civics* dan Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang menyosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum 1968-1975. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui revisi taksonomi Bloom dkk., dapat juga menggunakan jenjang afektif, berupa penerimaan nilai (*receiving*), penanggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasi nilai (*organization*), karakteristik nilai (*characterization*).²⁵

Dalam pembicaraan mengenai nilai, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki arti yang penting dan mendalam baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan kependidikan dan pembelajaran. Nilai-

²²Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 43.

²³Kaelan, *Negara Kebangsaan*, hlm. 163.

²⁴Jalaludin dan Abdullah, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 179.

²⁵L.W Anderson dan David R. Kratzwoh, *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen, Revisi Taksonomi Bloom*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

nilai Pancasila ini dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Indonesia merupakan landasan, bagian dari kurikulum, serta acuan dalam pelaksanaan tata nilai yang berlaku di sekolah dan mempengaruhi langsung terhadap mutu, kualitas pribadi dan sikap nasionalisme seorang peserta didik.

Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan meminjam konsep internalisasi dari ilmu sosial. Secara terminologis dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa definisi internalisasi yakni merupakan penghayatan atau proses pemahaman terhadap ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menyadari keyakinan akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.²⁶ Menurut Johnson, internalisasi adalah “proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan system kepribadian”. Berdasarkan pendapat tersebut, internalisasi dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap perilaku.²⁷ Internalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses memasukkan atau mendoktrin suatu sikap, tingkah laku atau lain sebagainya kepada peserta didik. Menurut Muhaimin,

“dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, terdapat tahapan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam menginternalisasi suatu nilai kepada anak asuh atau peserta didik”.²⁸

Ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu:

- a. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa” (<https://kbbi.web.id/internalisasi>, dikunjungi 24 Maret 2019).

²⁷Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 124.

²⁸Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali pers, 1996), hlm. 53.

- b. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.
- c. Tahap Transinternalisasi: Pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan aktif secara verbal, sikap dan mental.²⁹

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, dalam kerangka *nation and character building*. Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu (Manipol/Usdek). Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika Kurikulum pendidikan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi pembinaan warganegara yang baik, yang Pancasilais, juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk dalam kurikulum pendidikan sebagai mata pelajaran. Pelajaran tersebut berisi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, yang di dalamnya terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pengganti nama PKN dengan maksud untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar.³⁰ Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa muatan materi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam

²⁹Cahyo Wibowo, dkk., “Pengaruh Internalisasi Nilai Dalam Konsep Hierarkial Pancasila Terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik” (*Jurnal Kultur Demokrasi*, Volume 3, No. 7, 2015).

³⁰Bunyamin Maftuh, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan” (*Jurnal Educationist*, Vol. II, No. 2, Juli 2008), hlm. 134-144.

pendidikan mengalami perubahan mulai dari era pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk menulis sejarah pendidikan khususnya mengenai implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia 1966-1975.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi). Hubungan antara metode sejarah dan penggunaan sumber sejarah sangat erat. Penulisan sejarah hanya dapat dilakukan jika ada sumber sejarah peninggalan masa lalu berupa dokumen, sumber lisan, foto, artefak, media audio, audio visual. Tanpa sumber sejarah, sebuah peristiwa sejarah tidak akan bisa ditulis (direkonstruksi).³¹

Metode sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sintese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai.³² Adapun langkah-langkah metodis dalam penelitian sejarah adalah:

Pertama, heuristik atau penelusuran sumber sejarah adalah suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.³³ Pengumpulan sumber dilakukan di beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta yang melakukan pendokumentasian dan penyimpanan arsip yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maupun Perpustakaan Kota

³¹Tim Revisi, *Pedoman Penulisan*, hlm. 26.

³²Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

³³G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

Semarang, dan *UNY Digital Library*, serta Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sementara itu, jenis sumber yang diperoleh yaitu sumber tertulis berupa koran-koran sezaman, buku-buku pelajaran terkait, buku-buku pedoman pengajaran dan buku-buku literatur, serta surat kebijakan pemerintah pada eranya. Sumber-sumber tersebut masih dibagi lagi menjadi dua jenis sumber primer berupa koran-koran sezaman dan surat kebijakan pemerintah yang relevan dengan pokok kajian serta buku-buku pelajaran terkait dan pedoman pengajaran. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku literatur dan jurnal-jurnal ilmiah.

Kedua, kritik atau pengujian sumber dibagi ke dalam dua jenis yaitu kritik ekstern atau uji otentisitas sumber dan kritik intern atau uji kredibilitas sumber. Tujuan dari kritik ini untuk memberikan penilaian secara kritis sumber sejarah yang diperoleh. Uji otentisitas sumber digunakan untuk melihat apakah sumber yang diperoleh asli atau palsu sementara uji kredibilitas sumber untuk melihat kebenaran yang terkandung di dalam sumber sejarah. Sumber-sumber berupa Surat Kebijakan Pemerintah, maupun buku-buku pelajaran terkait dan pedoman pengajaran yang didapat dari Perpustakaan Nasional Indonesia dan Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yang sudah tidak diragukan otentisitas dan kredibilitasnya.

Ketiga, kegiatan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber, yang disebut juga sebagai interpretasi. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan studi tentang Perubahan Muatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem pendidikan Nasional Tahun 1966-1975 untuk mencari hubungan antar satu fakta dan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian, hal tersebut dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini peneliti menggunakan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial serta Psikologi Pendidikan sebagai ilmu bantu yang berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antara akta.

Keempat, penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini fakta yang sudah disintesis kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dihasilkan historiografi yang baik sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku agar dapat dipahami oleh para pembaca dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan rencana bagian isi skripsi yang disusun. Hal-hal yang dikemukakan berupa uraian mengenai bab-bab dan subbab-subbab yang tercantum.³⁴ Adapun penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I adalah **PENDAHULUAN**, pada bab ini terdapat uraian pokok mengenai Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II adalah **SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 1966-1975**. Pada bab ini menjelaskan tentang situasi politik dan kebijakan Pemerintah tahun 1966-1975 yang mempengaruhi dunia pendidikan, yang tentunya memuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I dan II. Sistem pendidikan nasional Indonesia Tahun 1966-1975 juga dijabarkan melalui landasan filsafat pendidikan, sistem pendidikan nasional, dan peserta didik pada masa Orde Baru.

BAB III adalah **PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA TRANSISI ORDE LAMA KE ORDE BARU**. Pembahasan tersebut diuraikan melalui perubahan kurikulum dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa. Pada bab ini menjelaskan kurikulum yang diterapkan di Indonesia mulai dari akhir Orde Lama (Pancawardhana 1960-1966) dan awal Orde baru (Kurikulum 1968). Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi sarana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia yang merupakan buah dari Kurikulum 1968 dijelaskan pada bab ini.

BAB IV adalah **PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM NASIONAL INDONESIA TAHUN 1975**. Pembahasan diuraikan melalui penerapan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975 yang terbagi atas Pendidikan Moral Pancasila Tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Moral Pancasila

³⁴Tim Revisi, *Pedoman Penulisan*, hlm. 30.

Tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Moral Pancasila Tingkat Sekolah Menengah Atas. Sub bab terakhir ialah menjelaskan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Nasional Indonesia pada Masa Orde baru.

BAB V adalah **SIMPULAN**. Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berupa simpulan. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.